**Memaknai Kemerdekaan Indonesia di Usia ke-80 Tahun:**

**Refleksi Historis, Krisis Kontemporer, dan Tantangan Masa Depan**

**Abstrak**

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 telah memasuki usia ke-80 tahun pada 2025. Usia yang matang ini seharusnya menjadi tonggak pencapaian kedaulatan dalam politik, ekonomi, hukum, dan kebebasan sipil. Namun, realitas kontemporer menunjukkan paradoks: meski merdeka secara formal, bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam penegakan hukum, kesenjangan ekonomi, serta menyempitnya ruang kebebasan berpendapat. Artikel ini menguraikan makna kemerdekaan melalui refleksi historis sekaligus analisis kondisi aktual bangsa berdasarkan data indeks demokrasi, gini ratio, serta catatan hak asasi manusia. Refleksi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia masih bersifat parsial, dan memerlukan upaya serius untuk diwujudkan secara substantif menuju Indonesia Emas 2045.

**Kata kunci:** kemerdekaan, demokrasi, hukum, ekonomi, kebebasan berpendapat

**Pendahuluan**

Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya kolonialisme di Indonesia dan awal dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang merdeka. Kemerdekaan, dalam kerangka konseptual, bukan hanya sekadar kedaulatan politik, melainkan juga mencakup keadilan hukum, kemandirian ekonomi, serta kebebasan sipil (Sen, 1999).

Memasuki usia ke-80 tahun, Indonesia menghadapi pertanyaan fundamental: apakah kemerdekaan yang diproklamasikan delapan dekade lalu telah terwujud secara substantif, ataukah masih sebatas simbolik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan refleksi historis dan kajian kritis atas kondisi kontemporer bangsa.

**Tinjauan Historis Perjalanan Kemerdekaan**

Perjalanan 80 tahun Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase besar:

1. **Fase Revolusi Fisik (1945–1950-an):** bangsa berjuang mempertahankan kedaulatan dari ancaman kolonialisme baru.
2. **Fase Konsolidasi dan Pembangunan (1960–1990-an):** pembangunan ekonomi dan stabilisasi politik, namun disertai keterbatasan demokrasi.
3. **Fase Reformasi (1998–sekarang):** demokratisasi, keterbukaan informasi, serta desentralisasi, namun juga diiringi tantangan berupa korupsi, oligarki politik, dan polarisasi sosial.

Historiografi ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan selalu mengalami redefinisi, sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi.

**Kemerdekaan dalam Krisis Kontemporer**

**1. Kemerdekaan Hukum dan Demokrasi yang Terkikis**

Meskipun secara formal Indonesia menganut sistem demokrasi, realitas menunjukkan adanya *democratic backsliding*. Menurut laporan Economist Intelligence Unit (2024), skor indeks demokrasi Indonesia tahun 2024 hanya **6,44** (skala 0–10), menurun dari **6,50** pada 2023 dan **6,71** pada 2022. Skor ini menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy*. Dimensi fungsi pemerintahan dan proses elektoral mengalami penurunan signifikan, sedangkan budaya politik (skor 5,00) dan kebebasan sipil (skor 5,29) tercatat paling rendah (*Economist Intelligence Unit*, 2024; Tempo, 2025). Fenomena ini mencerminkan melemahnya kedaulatan rakyat dan independensi hukum.

**2. Kemerdekaan Ekonomi yang Belum Tercapai**

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menunjukkan bahwa Gini Ratio pada Maret 2023 sebesar **0,388**, menurun menjadi **0,379** pada Maret 2024, namun kembali naik menjadi **0,381** pada September 2024. Kesenjangan lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dengan *Gini Ratio* sekitar **0,402**. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, sehingga kemerdekaan ekonomi bagi rakyat kecil masih jauh dari tercapai.

**3. Menyempitnya Ruang Kebebasan Berpendapat**

uang kebebasan sipil di Indonesia semakin tertekan. Menurut Amnesty International (2025), pada 2024 tercatat **344 orang ditangkap**, **152 mengalami luka fisik**, dan **17 terkena gas air mata** selama aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilu. Selain itu, terdapat **123 kasus kekerasan fisik** dan **288 ancaman digital** terhadap jurnalis dan aktivis. Amnesty juga mencatat penggunaan *spyware* oleh pemerintah dalam memantau masyarakat masih berlangsung.

**1. Penangkapan dan Kekerasan saat Protes (2024)**

**Amnesty International** menyebutkan bahwa dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pemilu sepanjang 2024:

* Sebanyak **344 orang ditangkap**,
* **152 mengalami luka fisik**,
* Dan **17 terkena gas air mata**.

Beberapa di antara korban juga mengalami bentuk pelanggaran berlapis, termasuk tahanan tanpa akses hukum, sebagaimana didokumentasikan lebih mendetail dalam laporan Amnesty.

**2. Serangan terhadap Jurnalis dan Aktivis**

Amnesty juga melaporkan **123 kasus kekerasan fisik** dan **288 ancaman digital** yang menimpa pekerja media serta aktivis pada tahun yang sama.
Laporan jurnalis menyebutkan bahwa di antaranya terdapat 11 jurnalis di Jakarta yang menjadi target ancaman digital.

**3. Penggunaan *Spyware* oleh Pemerintah**

Menurut Amnesty, pemerintah Indonesia menggunakan *spyware* untuk memantau para pembangkang dan aktivis antara tahun **2017–2023**, termasuk beberapa perangkat pengawasan digital yang diimpor dari negara seperti Yunani, Israel, Malaysia, dan Singapura.

**4. Intimidasi Terhadap Jurnalis — Kasus Tempo**

Kasus ekstrem dari intimidasi terhadap jurnalis dilaporkan oleh *The Guardian*:

* Seorang jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, menerima **kepala babi** sebagai ancaman, diikuti oleh **enam tikus tanpa kepala** yang dikirim ke redaksi. *Human Rights Watch* juga mencatat peristiwa tersebut, menyoroti bentuk ancaman fisik yang simbolik serta pengurungan kebebasan pers di Indonesia.

Meski Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah dan korporasi tidak boleh mengajukan gugatan pencemaran nama baik (*defamation*), praktik intimidasi terhadap pers tetap terjadi. Salah satu contoh adalah insiden pengiriman kepala babi dan tikus tanpa kepala ke redaksi majalah *Tempo* pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers sebagai pilar demokrasi masih menghadapi ancaman serius.

**Refleksi dan Harapan**

Paradoks kemerdekaan di usia ke-80 tahun mengingatkan bahwa perjuangan bangsa belum selesai. Secara formal, Indonesia telah berdaulat; namun secara substantif, rakyat masih menghadapi keterbatasan dalam hukum, ekonomi, dan kebebasan berpendapat.

Untuk itu, ada beberapa agenda reflektif yang perlu ditegaskan:

* **Restorasi Hukum dan Demokrasi:** memperkuat independensi lembaga hukum, menegakkan keadilan tanpa intervensi politik, dan memastikan demokrasi berjalan secara substantif.
* **Transformasi Ekonomi Inklusif:** mengurangi ketimpangan melalui distribusi sumber daya yang adil, memperkuat UMKM, dan membangun kemandirian pangan, energi, serta teknologi.
* **Revitalisasi Kebebasan Sipil:** menjamin hak masyarakat untuk mengkritik, berpendapat, dan berpartisipasi tanpa rasa takut, sekaligus melindungi pers dari praktik intimidasi.

**Kesimpulan**

Kemerdekaan Indonesia pada usia ke-80 tahun menghadirkan refleksi mendalam bahwa kemerdekaan sejati belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Penurunan indeks demokrasi, ketimpangan ekonomi yang berulang, serta pengekangan terhadap kebebasan sipil memperlihatkan bahwa bangsa ini menghadapi krisis kemerdekaan substantif.

Perayaan 80 tahun kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momentum untuk mengembalikan ruh proklamasi 1945: menghadirkan kedaulatan politik, keadilan hukum, kesejahteraan ekonomi, dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Refleksi kritis ini penting sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045, agar kemerdekaan benar-benar bermakna dan berkelanjutan.

Namun, refleksi ini juga harus jujur melihat kenyataan. Masih ada jutaan rakyat kecil yang berjuang di tengah biaya hidup yang tinggi, kesempatan kerja yang terbatas, serta akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata. Kemerdekaan ekonomi, yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara, masih terasa jauh dari harapan. Di saat sebagian kecil kelompok elite menikmati pertumbuhan, sebagian besar rakyat justru bergulat dengan kesenjangan yang terus bertambah.

Tidak hanya itu, kebebasan sipil yang menjadi roh demokrasi juga masih dalam tekanan. Ketika suara kritis dibungkam, jurnalis diteror, dan aktivis diawasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan individu, melainkan juga masa depan demokrasi itu sendiri. Kemerdekaan tanpa kebebasan berbicara akan kehilangan makna, dan demokrasi tanpa ruang partisipasi rakyat akan berubah menjadi sekadar formalitas.

Oleh karena itu, peringatan 80 tahun kemerdekaan harus menjadi titik balik. Bangsa ini membutuhkan keberanian politik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan membangun sistem ekonomi yang lebih adil serta inklusif. Tanpa langkah-langkah berani tersebut, Indonesia akan terjebak dalam kemerdekaan yang hanya sebatas simbol, bukan kenyataan.

Refleksi ini mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah yang selesai pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah proses yang terus diperjuangkan, dirawat, dan diwujudkan dalam kehidupan nyata rakyat. Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai apabila bangsa ini mampu menegakkan demokrasi yang sehat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta menjamin kebebasan setiap warganya.

Pada akhirnya, perayaan kemerdekaan ke-80 ini seharusnya tidak hanya menjadi nostalgia sejarah, tetapi juga panggilan moral: apakah bangsa ini sungguh-sungguh menjaga amanah para pendiri republik? Apakah kemerdekaan sudah dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat, atau hanya menjadi milik segelintir? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus menjadi pengingat, bahwa tugas besar bangsa ini belum selesai.

**Daftar Pustaka**

1. Amnesty International. (2024). Indonesia: Human rights report. Amnesty International.
2. Amnesty International. (2024). Indonesia 2023. Amnesty International Report. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
3. Amnesty Tech. (2024, May 2). A web of surveillance: Unravelling a murky network of spyware exports to Indonesia. Amnesty International Security Lab. Retrieved from <https://securitylab.amnesty.org/latest/2024/05/global-a-web-of-surveillance-unravelling-a-murky-network-of-spyware-exports-to-indonesia/>
4. Associated Press. (2024, December 18). Amnesty says Indonesia suppresses free speech with crackdowns on public protests. AP News. Retrieved from <https://apnews.com/article/d604e050110bb42614642245d7e4ccc8>
5. Badan Pusat Statistik. (2024). Gini ratio September 2024. BPS RI.
6. Economist Intelligence Unit. (2024). Democracy index 2024: Age of conflict. The Economist Group. Retrieved from <https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2025/03/Democracy_INDEX_2024.pdf>
7. Human Rights Watch. (2025, April 22). Indonesia: Increasing attacks on media. HRW News. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2025/04/22/indonesia-increasing-attacks-media>
8. Lamb, K. (2025, March 28). A pig's head and decapitated rats: A new era of intimidation dawns for journalists in Indonesia. The Guardian. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/28/intimidation-journalists-indonesia-pig-heads-rats>
9. Reuters. (2025). Indonesian court bans government, company from defamation complaints. Reuters.
10. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
11. Tempo. (2025, March 2). Indonesia’s democracy index drops three spots in 2024. Tempo.co. Retrieved from <https://en.tempo.co/read/1982766/indonesias-democracy-index-drops-three-spots-in-2024>
12. The Guardian. (2025). Intimidation of journalists in Indonesia. The Guardian.